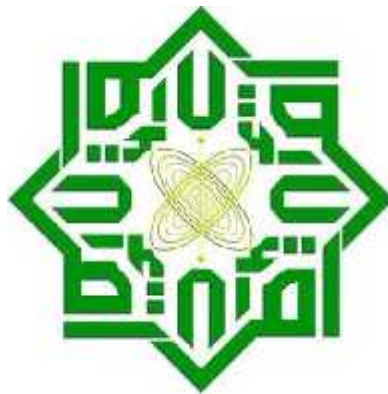


SKRIPSI

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mengikuti
Ujian Oral Komprehensif Sarjana Lengkap
Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim
Riau



Oleh

WIDYA NOVIARTI
NIM. 10873001864

**JURUSAN AKUNTANSI
KONSENTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1434 H/2013 M**

ABSTRAK

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Oleh: Widya Noviarti

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: variabel-variabel pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan penerimaan PAD lainnya berpengaruh secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah, variabel-variabel pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan penerimaan PAD lainnya berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir dengan pertimbangan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hilir selama periode tahun 2000 hingga tahun 2011 secara umum terus mengalami peningkatan, dan pajak daerah sebagai salah satu komponen PAD juga memiliki peran yang relatif penting terhadap keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Berdasarkan statistik nilai t Pajak Daerah (x_1) sebesar 4.258, hasil ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah (X_1) mempengaruhi PAD di Kabupaten Indragiri Hilir. Nilai t Retribusi Daerah (x_2) sebesar 3.871, hasil ini menunjukkan bahwa Retribusi Daerah (x_2) mempengaruhi PAD di Kabupaten Indragiri Hilir. Nilai t Bagian Laba Usaha Daerah (x_3) sebesar 2.932, hasil ini menunjukkan bahwa Bagian Laba Usaha Daerah (x_3) mempengaruhi PAD di Kabupaten Indragiri Hilir. Nilai t Penerimaan PAD (x_4) sebesar 8.501, hasil ini menunjukkan bahwa Penerimaan PAD (x_4) mempengaruhi secara signifikan terhadap PAD di Kabupaten Indragiri Hilir. Variabel-variabel pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan penerimaan PAD lainnya berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan angka Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0.988 berarti hubungan antara variabel dependen terhadap independen sangat kuat atau tinggi karena berada antara nol dan satu..

Kata kunci : Pajak Daerah (x_1), Retribusi Daerah (x_2), Bagian Laba Usaha Daerah (x_3), Penerimaan PAD (x_4), Pendapatan Asli Daerah (Y)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penulisan.....	7
1.5. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 10
2.1. Pengertian Pajak	10
2.2. Definisi Otonomi Daerah	11
2.3. Desentralisasi Fiskal.....	13
2.4. Penerimaan Daerah.....	16
2.5. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	17
2.6. Pajak Daerah.....	20
2.7. Definisi Retribusi.....	26
2.8. Bagian Laba Usaha Daerah.....	28
2.9. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya	28
2.10. Asas Pemungutan Pajak	29
2.11. Pandangan Islam terhadap Pajak	31
2.12. Penelitian Terdahulu.....	32
2.13. Kerangka Pemikiran dan Hipotesis	33

BAB III METODE PENELITIAN.....	35
3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
3.2. Jenis dan Sumber Data	35
3.3. Metode Pengumpulan Data	36
3.4. Analisis Deskriptif	39
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 44
4.1. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	44
4.2. Deskripsi Data Penelitian	52
4.3. Analisis Kuantitatif Variabel Penelitian	54
4.4. Pembahasan.....	63
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	 64
5.1. Kesimpulan	64
5.2. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

1.	Tabel. I.1.	Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir	4
2.	Tabel. IV.1.	Latar Belakang Pendidikan	47
3.	Tabel. IV.2.	Kepangkatan PNS	47
4.	Tabel. IV.3.	Tenaga Non PNS (Juru Pungut).....	48
5.	Tabel. IV.4.	Tenaga Non PNS Lainnya.....	48
6.	Tabel. IV.5.	Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir	53
7.	Tabel. IV.6.	Hasil Uji Multikolinearitas Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir	55
8.	Tabel. IV.7.	Hasil Uji Autokorelasi Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir	57
9.	Tabel. IV.8.	Uji Secara Parsial (Uji t) Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir	58
10.	Tabel. IV.9	Hasil Uji F Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir	59
11.	Tabel. IV.10.	Hasil Uji R Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir	60
12.	Tabel. IV.11.	Hasil Regresi Terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh daerah terutama sejak berlakunya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001. Dengan adanya otonomi daerah di pacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, undang-undang tentang Pemerintah Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Untuk melaksanakan dan menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu menggali sumber-

sumber keuangan sendiri agar dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dan efisien, yakni dalam bidang pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Dalam rangka menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, pemerintah daerah memerlukan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah dalam era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber penerimaan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Dana perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah yang memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah karena pajak daerah bermanfaat dalam

meningkatkan kemampuan penerimaan PAD dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan daerah otonom mencoba untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah, yang dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Indragiri Hilir.

Selain pajak juga terdapat retribusi, laba dari badan usaha dan penerimaan lain selain dari pajak dan retribusi. Dana Retribusi adalah suatu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Bagian Laba Usaha Daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan penerimaan lain-lain merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.

Realisasi penerimaan PAD Kabupaten Indragiri Hilir selama periode tahun 2000 hingga 2011 terus mengalami peningkatan, yaitu Rp 3,181 miliar pada tahun 2000 meningkat menjadi Rp 55,879 miliar pada tahun 2011. Untuk lebih jelasnya, perkembangan realisasi penerimaan PAD Kabupaten Indragiri Hilir dapat kita lihat pada Tabel I.1.

Tabel I.1.
Realisasi PAD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2000-2011

TAHUN	PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	BAGIAN LABA USAHA DAERAH	PENERIMAAN PAD LAINYA	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2000	1,189,038,786	1,660,242,759	66,618,904	276,028,583	18,087,875,734
2001	2,705,862,888	11,263,521,438	116,562,270	2,572,197,220	374,057,471,829
2002	4,064,772,991	11,222,824,238	429,141,046	3,883,215,983	392,643,355,441
2003	5,313,846,895	11,112,035,017	3,529,680,153	2,972,140,906	421,005,557,960
2004	5,187,414,929	11,069,905,659	1,732,247,442	2,761,070,217	476,131,682,785
2005	5,259,269,439	14,814,998,641	1,143,347,199	3,643,158,429	579,969,413,664
2006	4,694,395,417	19,288,997,527	2,149,958,391	10,590,888,749	829,806,641,178
2007	7,021,638,974	19,646,710,610	5,342,859,212	11,989,128,399	824,302,246,791
2008	6,530,560,008	19,503,294,246	2,409,388,271	9,537,785,883	949,360,249,515
2009	8,333,477,094	20,805,759,393	3,901,095,591	7,594,741,989	846,292,471,399
2010	7,209,504,368	16,653,937,592	7,083,354,858	20,041,017,009	1,064,066,523,327
2011	10,027,902,162	14,105,943,496	6,916,816,048	24,828,985,385	1,394,239,478,794

Sumber: Dispenda Kabupaten Indragiri Hilir, 2011

Pada Tabel I.1 dapat kita lihat bahwa relisasi penerimaan PAD Kabupaten Indragiri Hilir mengalami peningkatan selama periode tahun 2000-2011. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi daerah yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir dapat memberikan kontribusi yang maksimal dari tahun ke tahun sehingga pemanfaatannya dapat semakin dioptimalkan.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Begitupun dengan daerah, seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah juga memiliki tanggung jawab sendiri untuk mengelola perpajakannya. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi

seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu daerah menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

Oleh karena itu, pajak juga penting di dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam TAP MPR No.IV/MPR/2000 ditegaskan bahwa:

“Kebijakan desentralisasi daerah diarahkan untuk mencapai peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreativitas pemerintah daerah, keselarasan hubungan antara pusat dan daerah serta antar daerah itu sendiri dalam kewenangan dan keuangan untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan serta penciptaan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah”.

Sebagai konsekuensi dari pemberian otonomi yang luas, maka sumber-sumber keuangan telah banyak yang bergeser ke daerah. Hal ini sejalan dengan makna desentralisasi fiskal yang mengandung pengertian bahwa kepada daerah diberikan:

1. Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri yang dilakukan dalam wadah PAD yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi daerah dengan tetap mendasarkan batas kewajaran.
2. Didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rina (2009). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pertama pada periode pengamatan. Periode pengamatan pada penelitian sebelumnya

dilakukan pada tahun 1994 hingga tahun 2006. Sedangkan dalam penelitian ini, menggunakan periode pengamatan dari tahun 2000-2011. Objek penelitian sebelumnya dilakukan di Kabupaten Sumedang, sedangkan pada penelitian ini dilakukan pada Kabupaten Indragiri Hilir.

Mengingat besarnya peran pajak daerah sebagai salah satu sumber utama penerimaan keuangan daerah dalam komponen PAD, sehingga membuatnya menjadi bagian yang sangat vital. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti seberapa besar potensi pajak daerah dan pengaruhnya terhadap PAD di Kabupaten Indragiri Hilir. Dari latar belakang di atas, maka peneliti mengambil judul tentang **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba menguraikan beberapa permasalahan yang akan diangkat. Adapun rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir?
3. Apakah bagian laba usaha daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir?

4. Apakah penerimaan PAD lainnya berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir?
5. Apakah variabel-variabel pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan penerimaan PAD lainnya berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap Pendapatan Asli Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya menyebutkan beberapa pokok permasalahan yang ingin penulis uraikan dan jawab dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir?
3. Untuk mengetahui pengaruh bagian laba usaha daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir?
4. Untuk mengetahui pengaruh penerimaan PAD lainnya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir?
5. Untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan penerimaan PAD lainnya secara bersama-sama (simultan) terhadap Pendapatan Asli Daerah?

1.4 Manfaat Penelitian

Hal-hal yang diperoleh dari penelitian tentang analisis pengaruh pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan dapat

bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang penulis teliti. Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang pajak daerah.
2. Bagi para pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dan masukan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah demi peningkatan PAD sehingga berpengaruh positif terhadap pembangunan daerah.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan mengenai permasalahan pajak daerah agar dapat lebih memahami seberapa besar pengaruh pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan sumber informasi tambahan dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya dengan mengangkat tema yang sama, atau hanya sebagai bahan bacaan untuk memperluas wawasan pembaca.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah mengidentifikasi pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah dengan peraturan dari daerah sendiri, pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya dilakukan oleh Pemerintah daerah, pajak yang ditetapkan dan atau dipungut

oleh pemerintah daerah dan pajak yang dipungut dan di administrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pugtaya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani. seberapa besar potensi pajak daerah yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir dan menganalisis pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Indragiri Hilir serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Indragiri Hilir dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Pengertian Pajak

Beberapa pengertian atau definisi tentang pajak yang diberikan para ahli di bidang keuangan negara, ekonomi, maupun hukum mancanegara untuk menjadi bahan perbandingan antara lain:

Menurut pakar perpajakan Waluyo dkk mengatakan (2003), pajak merupakan penerimaan Negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak merupakan sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat.

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan menurut Soemitro (1994), (dalam Santoso, 2005) pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Defenisi pajak sebagaimana disebutkan di atas, mencakup unsur – unsur sebagai berikut :

1. ***A Compulsory***, merupakan suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat yang dikenakan kewajiban perpajakan. Jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, maka dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan undang-undang. Dapat dikatakan bahwa kewajiban ini dapat dipaksakan oleh pemerintah.
2. ***Contribution***, diartikan sebagai iuran yang diberikan oleh rakyat yang memenuhi kewajiban perpajakan kepada pemerintah dalam satuan moneter.
3. ***By individual or organization***, iuran yang dapat dipaksakan tersebut dibayar oleh perorangan atau badan yang memenuhi kewajiban perpajakan.
4. ***Received by the government***, iuran yang diberikan tersebut dibayarkan kepada pemerintah selaku penyelenggara pemerintahan suatu Negara.
5. ***For public purposes***, iuran yang diberikan dari rakyat yang dapat dipaksakan yang merupakan penerimaan bagi pemerintah dijadikan sebagai dana untuk pemenuhan tujuan kesejahteraan rakyat banyak.

1.2 Definisi Otonomi Daerah

Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan

pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah yang melekat pada Negara kesatuan maupun Negara federasi. Di Negara kesatuan otonomi daerah lebih terbatas dari pada di Negara yang berbentuk federasi. Kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga daerah di Negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh Pemerintah pusat seperti hubungan luar negeri, pengadilan, moneter dan keuangan, pertahanan dan keamanan.

Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk melaksanakan kewenangan wajib tersebut, maka daerah otonom dalam melaksanakan otonomi daerah pada Pasal 22 yang menyatakan : Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban: a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. c. mengembangkan kehidupan demokrasi; d. mewujudkan keadilan dan pemerataan. e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan. g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. h. mengembangkan sistem jaminan sosial. i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah. j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah. k. melestarikan lingkungan hidup. l. mengelola administrasi kependudukan. m. melestarikan nilai sosial budaya. n. membentuk dan menetapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

1.3 Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab serta pembagian kekuasaan maupun wewenang untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan maupun aspek pengeluaran. Desentralisasi ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik.

Desentralisasi fiskal merupakan inti dari desentralisasi itu sendiri. Karena pemberian kewenangan di bidang politik maupun administrasi tanpa diikuti desentralisasi fiskal maupun desentralisasi yang sia-sia, sebab untuk dapat melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab serta tugas-tugas pelayanan publik tanpa diberi wewenang di dalam penerimaan atau pengeluaran maka desentralisasi fiskal tidak akan efektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Sinaga dan Siregar (2005), dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal, desentralisasi berarti pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam menyusun derajat desentralisasi dikemukakan oleh Muluk (2009), dengan mengemukakan; pertama, derajat desentralisasi dapat dilihat dari fungsi atau urusan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Semakin banyak fungsi yang didesentralisasikan maka semakin tinggi pula derajat desentralisasinya. Kedua, adalah jenis pendelegasian fungsi, ada dua jenis pendelegasian fungsi yakni; *open-end arrangement* atau *general competence* dan *ultra-vires doctrine*. Jika suatu pemerintah daerah memiliki fungsi atas tipe pendelegasian *general competence* maka dapat dianggap derajat desentralisasinya lebih besar. Ketiga,

adalah jenis kontrol pemerintah pusat atas pemerintah daerah. Kontrol represif derajat desentralisasinya lebih besar ketimbang kontrol yang bersifat preventif.

Faktor yang keempat, adalah berkaitan dengan keuangan daerah yang menyangkut sejauh mana adanya desentralisasi pengambilan keputusan baik tentang penerimaan maupun pengeluaran pemerintah daerah. Kelima, adalah tentang metode pembentukan pemerintahan daerah. Derajat desentralisasi akan lebih tinggi jika sumber otoritas daerah berasal dari ketetapan legislatif ketimbang pendelegasian dari eksekutif. Keenam, adalah derajat ketergantungan finansial pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Semakin besar presentasi bantuan pemerintah pusat dibandingkan pendapatan asli daerah (PAD) maka semakin besar ketergantungan daerah tersebut secara finansial terhadap pusat. Ini berarti bahwa derajat desentralisasinya lebih rendah. Ketujuh, adalah besarnya wilayah pemerintahan daerah. Ada anggapan bahwa semakin luas wilayahnya maka semakin besar derajat desentralisasinya karena pemerintah daerah lebih dapat mengatasi persoalan dominasi pusat atas daerah. Namun demikian, hubungan antara besaran wilayah dengan kontrol yang masih terbuka untuk diperdebatkan.

Faktor kedelapan, adalah politik partai. Jika perpolitikan di tingkat lokal masih didominasi organisasi politik tingkat nasional maka derajat desentralisasinya dianggap lebih rendah jika dibandingkan dengan jika perpolitikan tingkat lokal lebih didominasi oleh organisasi politik lokal dan lebih mandiri dari organisasi politik nasional. Sedangkan faktor lainnya adalah struktur dari sistem pemerintahan desentralistik. Sistem pemerintahan yang

sederhana dianggap memiliki derajat desentralisasi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang lebih kompleks.

1.4 Penerimaan Daerah

Sumber Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. PAD merupakan pendapatan yang diterima daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri, mengandalkan dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak dan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber-sumber pendapatan daerah adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
 - a) Pajak daerah;
 - b) Retribusi daerah;
 - c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d) Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Dana perimbangan terdiri dari dua

jenis, yaitu dana bagi hasil dan dana transfer. Dana bagi hasil terdiri dari bagi hasil penerimaan pajak (*tax sharing*) dan bagi hasil penerimaan Sumber Daya Alam (SDA). Adapun yang termasuk dalam pembagian hasil perpajakan adalah Pajak Penghasilan (PPh) perorangan, PBB, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan pembagian hasil penerimaan dari SDA berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Dana transfer sebagai komponen dana perimbangan lainnya, terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sedangkan sumber penerimaan daerah yang lainnya, yaitu pembiayaan bersumber dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah;
2. Penerimaan pinjaman daerah;
3. Dana cadangan daerah; dan
4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

1.5 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli

daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah : meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan UU nomor 32 tahun 2004 pasal 79 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari: 1. hasil pajak daerah, 2. hasil retribusi daerah, 3. hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, 4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Ad.1. Pajak Daerah : Pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk investasi publik. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan kata lain pajak daerah adalah : pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah.

Ad.2. Retribusi Daerah : Retribusi adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung oleh karena itu setiap pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah senantiasa berdasarkan prestasi dan jasa yang diberikan kepada masyarakat, sehingga keluasaan retribusi daerah

terletak pada yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi retribusi sangat berhubungan erat dengan jasa layanan yang diberikan pemerintah kepada yang membutuhkan. Beberapa ciri-ciri retribusi yaitu : a. retribusi dipungut oleh negara, b. dalam pungutan terdapat pemaksaan secara ekonomis, c. adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk, d. retribusi yang dikenakan kepada setiap orang / badan yang menggunakan /mengenyam jasa-jasa yang disediakan oleh negara. Pengelompokan retribusi yang meliputi : a. retribusi jasa umum, yaitu: retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, b. retribusi jasa usaha, yaitu: retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemda dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya disediakan oleh sektor swasta.

Ad. 3. Perusahaan Daerah : Dalam usaha menggali sumber pendapatan daerah dapat dilakukan dengan berbagai cara, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat penting dan selalu mendapat perhatian khusus adalah perusahaan daerah. Perusahaan Daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat: a. memberi jasa, b. menyelenggarakan pemanfaatan umum, c. memupuk pendapatan. Tujuan perusahaan daerah untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur. Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut perundang-undangan yang mengatur

pokok-pokok pemerintahan daerah. 4. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan menguasai hajat hidup orang banyak di daerah, yang modal untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ad.4. Pendapatan Asli Daerah Yang Sah : Pendapatan asli daerah tidak seluruhnya memiliki kesamaan, terdapat pula sumber-sumber pendapatan lainnya, yaitu penerimaan lain-lain yang sah. Kelompok penerimaan lain-lain dalam pendapatan daerah Tingkat II mencakup berbagai penerimaan kecil-kecil, seperti hasil penjualan alat berat dan bahan jasa. Penerimaan dari swasta, bunga simpanan giro dan Bank serta penerimaan dari denda kontraktor. Namun walaupun demikian sumber penerimaan daerah sangat bergantung pada potensi daerah.

1.6 Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan hal penting bagi pembangunan seperti kita ketahui bersama secara umum pajak adalah semacam iuran yang bersifat wajib yang besaran dan ketentuannya ditetapkan oleh Negara. Pajak merupakan pengalihan sumber ekonomi dari sektor swasta atau pribadi ke Negara atau publik. Secara umum, Pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Rahdina, 2008).

Selain unsur-unsur pajak, dari definisi di atas terlihat adanya dua fungsi pajak, yaitu:

Fungsi *budgetair* ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal, yaitu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Disebut sebagai fungsi utama, karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali muncul. Pajak digunakan sebagai alat untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa ada kontraprestasi secara langsung dari zaman sebelum masehi sudah dilakukan.

Fungsi *regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi *budgetair*. Disamping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta.

Dalam memungut suatu pajak, terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Menurut Rosdiana dan Tarigan (2005), banyak pendapat ahli yang mengemukakan tentang asas-asas perpajakan yang harus ditegakkan dalam membangun suatu sistem perpajakan. Di antara pendapat para ahli tersebut, yang paling terkenal adalah *four maxims* dari Adam Smith yang mengemukakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas empat asas, yaitu:

1. Prinsip kesamaan/keadilan (*equity*). Artinya bahwa beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak.
2. Prinsip kepastian (*certainly*). Pajak hendaknya tegas, jelas, dan pasti bagi setiap wajib pajak sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan memudahkan administrasi pemerintah sendiri.
3. Prinsip kecocokan/kelayakan (*convenience*). Pajak jangan terlalu menekan seorang wajib pajak, sehingga wajib pajak dengan suka dan senang hati melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.
4. Prinsip ekonomi (*economy*). Pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang minimal, dalam artian bahwa jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar dari pada jumlah penerimaan pajaknya.

Menurut Mardiasmo (2002), di samping penggunaan prinsip di atas, terdapat dua pendekatan yang lebih mudah dilaksanakan yaitu *benefit approach* dan *ability to pay approach*.

1. *Benefit approach*, dengan kata lain adalah prinsip pengenaan pajak berdasarkan atas manfaat yang diterima oleh seorang wajib pajak dari pembayaran pajak itu kepada pemerintah.
2. *Ability to pay approach*, disebut pula dengan prinsip kemampuan untuk membayar atau berdasarkan daya pikul seorang wajib pajak. Dengan kata lain ialah bahwa seorang wajib pajak akan dikenai beban pajak sesuai dengan kemampuannya untuk membayar pajak.

Kedua pendekatan di atas adalah berdasarkan atas prinsip kesamaan (*equity*), dimana prinsip kemanfaatan (*benefit principle*) berdasarkan atas

kesamaan manfaat yang diterima oleh wajib pajak sesuai dengan pajak yang dibayarnya, sedangkan prinsip kemampuan membayar (*ability to pay principle*) berdasarkan atas kesamaan pengorbanan yang sesuai dengan kemampuan seorang wajib pajak untuk membayar pajak. Untuk mengukur kemampuan membayar pajak dapat dilihat dari tingkat pendapatan seorang wajib pajak.

Menurut Rosdiana dan Tarigan (2005), berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak pusat terdiri dari:
 - a. Pajak Penghasilan (PPh);
 - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM);
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
 - d. Bea Materai.
2. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, ditetapkan sebelas jenis pajak daerah, yaitu empat jenis pajak propinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota.

Pajak propinsi terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak kabupaten/kota terdiri dari:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; dan
- g. Pajak Parkir.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Dari definisi tersebut jelas bahwa pajak daerah merupakan iuran wajib yang dapat dipaksakan kepada setiap orang (wajib pajak) tanpa kecuali. Ditegaskan pula bahwa hasil dari pajak daerah ini diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam mengeluarkan peraturan daerah (Perda) untuk memungut pajak dan retribusi di daerahnya masing-masing. Akan tetapi, perda-perda yang akan dikeluarkan oleh pemda tentu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang telah diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Menurut Saragih (2003), di samping jenis atau objek pajak daerah seperti yang telah disebutkan sebelumnya, daerah juga diberi keleluasaan atau peluang untuk menciptakan pajak daerah lainnya asal sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam menciptakan pajak baru adalah sebagai berikut:

1. Bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi;
2. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum;
3. Potensinya memadai;
4. Tidak berdampak negatif terhadap perekonomian;

5. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;
6. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.

1.7 Definisi Retribusi

Retribusi adalah suatu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Marihot P. Siahaan, 2005). Objek Retribusi adalah:

- a) Jasa Umum;
- b) Jasa Usaha, dan
- c) Perizinan Tertentu.

a. Retribusi Jasa Umum

Jenis retribusi jasa umum:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pelayanan Pasar;
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
12. Retribusi Pelayanan Pendidikan;
13. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

b. Retribusi Jasa Usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang diserahkan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

1. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum di manfaatkan secara optimal, dan
2. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. Retribusi Tempat Penginapan/ Persinggahan/ Villa;
7. Retribusi Rumah Potong Hewan;
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
10. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut (Marihot P. Siahaan, 2005) objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Retribusi Izin Gangguan;
4. Retribusi Izin Trayek; dan
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

1.8 Bagian Laba Usaha Daerah

Bagian Laba Usaha Daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Marihot P. Siahaan, 2005).

Jenis Bagian Laba Usaha Daerah adalah:

1. Bank Pembangunan Daerah (BPD);
2. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
3. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

1.9 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya

Merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah (Marihot P. Siahaan, 2005).

Jenis Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya adalah:

- a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- b. Jasa giro;
- c. Pendapatan bunga;
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

1.10 Asas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak didasarkan pada asas-asas tertentu bagi fiskus sehingga dengan asas ini negara memberi hak kepada dirinya sendiri untuk memungut pajak dari penduduknya, yang pada hakikatnya memungut dengan paksa (berdasarkan undang-undang) sebagian dari harta yang dimiliki penduduknya. Asas-asas tersebut antara lain:

1. Asas Domisili, pemungutan pajak tergantung pada tempat tinggal(domisili) wajib pajak. Wajib pajak tinggal disuatu negara maka negara iatulah yang berhak mengenakan pajak atas segala hal yang berhubungan dengan objek yang dimiliki wajib pajak yang menurut undang-undang dikenakan pajak.
2. Asas Sumber, cara pemungutan pajak yang bergantung pada sumber dimana objek pajak diperoleh.
3. Asas Kebangsaan, cara yang berdasar kebangsaan menghubungkan pengenaan pajak dengan kebangsaan dari suatu negara. Asas kebangsaan atau asas nasional adalah asas yang menganut cara pemungutan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan dari suatu negara.

Terdapat 3 tujuan pokok yang hendak dicapai setiap perubahan pada sistem pajak daerah, yaitu:

1. Menyederhanakan sistem pajak daerah, karena pada umumnya sekarang ini tampaknya memiliki “nilai pengganggu” (*nuisance value*) yang sangat besar dibandingkan dengan penerimaan yang dihasilkan. Perubahan semacam ini bertujuan menyingkirkan “bobot mati” (*deatweight burden*) pajak daerah, sesuai dngan berbagai macam perubahan di bidang pajak yang dilakukan pada akhir-akhir ini, dan akan kekhawatiran mengenai “ekonomi biaya tinggi”. Perubahan ini juga bertujuan mewujudkan sistem pajak yang lebih adil.
2. Menaikkan penerimaan dari pajak daerah, agar daerah tidak terlalu banyak bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini sekarang dirasa amatlah sangat penting, karena penerimaan pemerintah pusat dari eksport minyak sudah berkurang. Akan tetapi menaikkan pajak (penerimaan) bukanlah hal yang gampang segampang menaikkan bendera.
 - a. Tujuan pertama yang harus dihapus banyak jenis pajak daerah
 - b. Hampir semua lahan subur dikuasai pemerintah
 - c. Namun demikian, mungkin ada peluang untuk menaikkan penerimaan dari jenis-jenis tertentu dari pajak daerah dan menyerahkan wewenang sumber pajak baru kepada pemerintah daerah.
3. Perubahan sistem pajak juga mungkin ada yang menyangkut pemerintah daerah. Sekarang ini pemerintah daerah (setidaknya dalam teori) memiliki wewenang yang sangat luas untuk menetapkan tarif pajak jika

dibandingkan tahun 1980-an. Walaupun demikian pemerintah masih harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat melalui departemen dalam negeri yang menetapkannya.

Apabila “otonomi daerah” yang nyata benar-benar terwujud, maka itu akan menambah penghasilan pemerintah daerah setempat dan tentunya juga akan membawa dampak yang kurang baik bagi pemerintah pusat, karena hasil pajak akan beralih ke daerah masing-masing dan hanya sebagian saja yang akan disetorkan ke pemerintah pusat.

1.11 Pandangan Islam terhadap Pajak

Dalam Islam, kegiatan pemungutan pajak atau jizyah diatur sedemikian rupa, Allah SWT menyatakan bahwa segala apa yang dikerjakan oleh hambanya tentu ia akan mendapatkan balasannya. Manusia dalam bekerja dilarang untuk curang karena Allah SWT maha melihat segala sesuatu.

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt sebagai berikut:



Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (Depag,1990”152).

Berdasarkan ayat di atas, fiqh memandang jizyah sebagai pajak perseorangan. Pada zaman dahulu dengan membayarnya, orang Kristen, Yahudi, Magian, Sabeen atau Samaritan dapat melakukan perjanjian dengan kaum muslim yang memungkinkan mereka bukan hanya dibiarkan tapi juga memperoleh hak perlindungan.

Kata jizyah berasal dari kata *jaza'* yang berarti penggantian (kompensasi) atau bayaran untuk tujuan kebaikan atau denda atas suatu kejahatan. Dalam buku-buku fiqh, jizyah dibahas dalam kaitannya dengan perang jihad. Jizyah merupakan pajak yang dibebankan kepada dhimmi sebagai imbalan bagi perlindungan yang diberikan kepada mereka, keluarga, dan miliknya sebenarnya, jizyah merupakan pajak pengganti tugas kemiliteran dan upah mereka yang menggantikan tugas tersebut, misalnya dhimmi dibebaskan dari tugas kemiliteran setelah membayar jizyah (Irfan Mahmud Ra'na, 1997:99).

1.12 Penelitian Terdahulu

Rina (2009) meneliti analisis pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Sumedang. Ia menggunakan analisis deskriptif dan metode regresi komponen utama dan hasil penelitiannya menyatakan bahwa potensi pajak di Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan, pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap nilai PAD di Kabupaten Sumedang dengan elastisitas sebesar 0,193, yang berarti jika pajak daerah meningkat sebesar satu persen maka nilai total penerimaan PAD akan meningkat sebesar 0, 193 persen.

1.13 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Pemberlakuan otonomi daerah merupakan kewajiban dari pemerintah terhadap semua pertanyaan dan keraguan masyarakat saat ini. Otonomi daerah juga merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban yang tidak lagi vertikal melainkan harus horizontal juga, artinya pertanggungjawaban tidak lagi kepada pemerintahan yang tingkatnya lebih tinggi melainkan juga kepada masyarakat melalui legislatif atau DPRD karena masyarakat berhak tahu tentang pengelolaan dan penggunaan uang mereka. Dengan otonomi daerah diharapkan pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat karena pemerintah daerah diharapkan dapat menggali potensi dan kemampuan daerah tersebut yang dimana merupakan pendapatan asli daerah. Seperti penelitian sebelumnya yang meneliti tentang Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumedang yang mengatakan bahwa Kabupaten Sumedang selama periode 1994 hingga tahun 1999 potensi pajak daerahnya terus mengalami peningkatan. Sementara itu pada tahun 2000 terjadi penurunan dan terjadi peningkatan kembali pada periode tahun 2001 hingga tahun 2006.

Berdasarkan permasalahan yang ada, salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan yang relatif penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan pendapatan asli daerah lainnya. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_{A1} : Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan asli daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

H_{A2} : Retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan asli daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

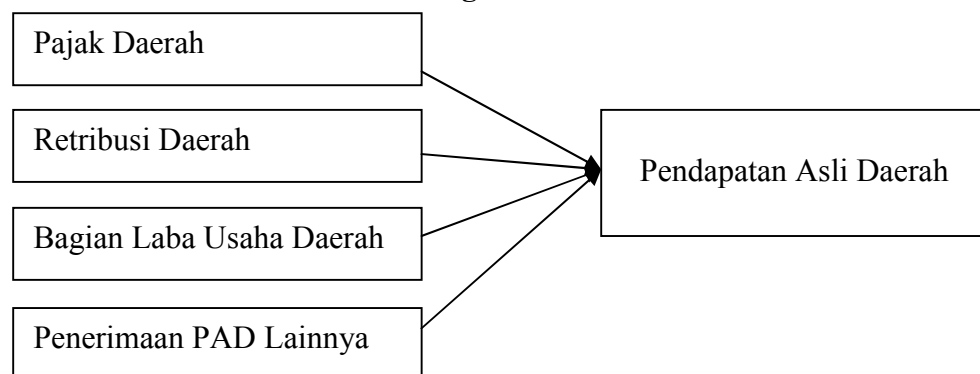
H_{A3} : Bagian laba usaha daerah berpengaruh terhadap Pendapatan asli daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

H_{A4} : Pendapatan asli daerah lainnya berpengaruh terhadap Pendapatan asli daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

H_{A5} : Pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan pendapatan asli daerah lainnya secara bersama-sama berpengaruh terhadap Pendapatan asli daerah.

Untuk mengetahui hubungan variabel independen dan dependen yang digunakan dalam penelitian ini, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar II.1.
Skema Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Indragiri Hilir dengan pertimbangan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Indragiri Hilir selama periode tahun 2000 hingga tahun 2011 secara umum terus mengalami peningkatan, dan pajak daerah sebagai salah satu komponen PAD juga memiliki peran yang relatif penting terhadap keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan daerah.

1.2 Jenis dan Sumber Data

Data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan bukan untuk kepentingan studi yang sedang dilakukan saat ini tetapi untuk beberapa tujuan lain (Jhon Hendri, 2009). Dengan jenis data *time series* yang diambil dari periode 2000 hingga tahun 2011 untuk data nilai potensi pajak daerah yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir dan periode tahun 2000 hingga tahun 2011 untuk dapat nilai realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah(PAD), pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan lain-lain PAD yang sah yang terdapat di KabupatenIndragiri Hilir. Data-data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Indragiri Hilir dan instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah *library research* dengan cara melihat, mencatat, dan menganalisis data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir.

3.3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel-variabel operasional yang dibahas adalah:

1. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara berdasarkan Undang-undang dan bersifat dapat di paksakan. pajak Daerah meliputi:

- a. Pajak Daerah Provinsi:
- b. Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (5%)
- c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (10%)
- d. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (5%)
- e. Pengembalian dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (20%)

2. Pajak Daerah Kabupaten Kota

- a. Hotel (10%)
- b. Restoran (10%)
- c. Hiburan (10%)
- d. Reklame (25%)
- e. Penerangan Jalan (10%)

f. Pengambilan Bahan Galian Golongan C (20%)

3. Retribusi Daerah

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah meliputi:

a. Jasa Umum

- 1) Pelayanan Kesehatan
- 2) Pelayanan Persampahan
- 3) Pelayanan KTP

b. Jasa Usaha

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan;
- 4) Retribusi Terminal;
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;

c. Perizinan Tertentu

- 1) Izin mendirikan bangunan
- 2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- 3) Retribusi Izin Gangguan;
- 4) Retribusi Izin Trayek; dan
- 5) Retribusi Izin Usaha Perikanan.

4. Bagian Laba Usaha Daerah

Bagian Laba Usaha Daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Bagian usaha daerah meliputi:

1. Bank pembangunan Daerah (BPD);
2. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM);
3. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

5. Pendapatan Asli Daerah Lainnya

Merupakan seluruh Pendapatan Asli Daerah selain PAD.

Pendapatan Asli Daerah meliputi:

1. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan
2. Jasa Giro
3. Pendapatan Bunga
4. Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing

3.3.2 Variabel Penelitian

Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel bebas (*independent variable*) ada empat variabel bebas yang digunakan dan diduga berpengaruh terhadap variabel terikat Y. variabel-variabel bebas dalam hal ini disebut variabel X yang terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan penerimaan PAD

lainnya. Menurut Sakaran (2008), Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat, entah secara positif atau negatif.

2. Variabel terikat (*dependent variable*) yaitu Pendapatan Asli Daerah.

1.4 Analisis Deskriptif

Proses deskripsi data pada dasarnya meliputi upaya penelusuran dan pengungkapan informasi yang relevan yang terkandung dalam data dan hasilnya disajikan dalam bentuk yang lebih sederhana, sehingga pada akhirnya mengarah pada keperluan adanya penjelasan dan penafsiran. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi seberapa besar potensi pajak daerah yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir dari waktu ke waktu dalam suatu series data selama periode tahun 2000 hingga tahun 2011. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Indragiri Hilir dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah.

3.4.1 Uji Normalitas Data

Menurut Priyatno (2009), Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data berskala ordinal, interval, ataupun rasio. Normalitas data merupakan asumsi yang sangat mendasar dalam analisis *multivariate*. Jika variasi yang dihasilkan dari distribusi data tidak normal, maka statistik yang dihasilkan tidak normal. Selanjutnya normalitas dibutuhkan dalam melakukan uji F dan uji t. data dinyatakan berdistribusi normal jika

signifikansi lebih besar dari 5 % atau 0.05.

Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi yang normal atau mendekati normal. Agar dapat melihat normalitas residual maka harus dilakukan uji normalitas residual. Normal atau tidaknya residual dapat dilihat dari grafik *normal propability plot*. Jika residual berada pada garis diagonal atau mendekati berarti residual tersebut terdistribusi secara normal. Namun jika residual terletak menyebar menjauhi garis diagonal berarti data tersebut tidak terdistribusi secara normal.

Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik *Kolomogorov-Smirnof* (K-S). Uji *Kolomogorov-Smirnof* (K-S) dilakukan dengan membuat hipotesis :

H₀ : Data residual berdistribusi normal

H_A : Data residual tidak berdistribusi normal

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, yaitu adanya hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. Metode pengujian yang digunakan yaitu dengan melihat nilai *inflation factor* (VIF) pada model

regresi. Jika VIF lebih besar dari 5, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Metode pengujian yang digunakan adalah uji Park, yaitu meregresi nilai residual (Lnei^2) dengan masing-masing variabel dependen (LnX_1 , LnX_2 dan LnX_3).

c. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heterokedesitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi.

3.4.3 Pengujian Hipotesis

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda (*multiple regression*) dengan formula sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + \epsilon_i$$

Dimana:

Y = Pendapatan Asli Daerah

X_1 = Pajak Daerah

X_2 = Retribusi Daerah

X_3 = Bagian Laba Usaha Daerah

X_4 = Pendapatan Asli Daerah Lainnya

ϵ_i = error

a. Uji Parsial (Uji t)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} sehingga dapat ditentukan apakah hipotesis yang telah dibuat signifikan atau tidak signifikan.

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $P_{value} > \alpha$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, dengan kata lain variabel independen secara individual tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $P_{value} < \alpha$, maka H_a diterima dan H_0 ditolak dengan kata lain variabel independen secara individual berpengaruh terhadap variabel dependen. Tingkat signifikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% (0,05).

b. Uji Simultan (Uji F)

Uji F sering disebut dengan uji koefisien regresi secara serentak. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel

independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

3.4.4 Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) adalah koefisien yang menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Persentase itu menunjukkan seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Semakin besar koefisien determinasinya, maka semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen.

Pengolahan data penelitian ini menggunakan *multiple regression* dengan bantuan program komputer SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 16.0.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1. Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. Data umum Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan dan merujuk kepada undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Detribusi Daerah, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir antara lain mengemukakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir adalah **"Melakukan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Penerimaan dan Pendapatan Daerah"**.

Guna penyelenggaraan tugas tersebut di atas maka Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi, antara lain:

- 1) Pelaksanaan penyusunan rencana pencairan dibidang anggaran daerah
- 2) Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pendapatan daerah
- 3) Pengembangan upaya-upaya peningkatan pendapatan
- 4) Perumusan dan penataan serta penetapan penerimaan

- 5) Penyusunan dan informasi di bidang pendapatan dan penerimaan daerah
- 6) Pelaksanaan dan penagihan, pembukuan dan verifikasi
- 7) Penagihan dan perhitungan serta restitusi
- 8) Penyelesaian keberatan / gugatan
- 9) Pendapatan retribusi dan pendapatan lain-lain
- 10) Pelaksanaan inventarisasi dan pembukuan benda dan barang kebutuhan
- 11) Penetapan dan penagihan pajak
- 12) Pengkajian dan upaya-upaya pendapatan
- 13) Pengembangan sistem informasi keuangan dan metode pendapatan daerah
- 14) Pelaksanaan administrasi umum, penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan
- 15) Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

b. Kewenangan

Sejalan dengan fungsi yang ada tersebut, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, memiliki kewenangan yang meliputi :

- 1) Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro di bidang pendapatan
- 2) Penelitian di bidang Pendapatan Daerah yang mencakup wilayah Kabupaten bidang pendapatan
- 3) Penyusunan kebijaksanaan teknis dan program kerja
- 4) Pemyelenggaraan pemungutan dan pemasukan Pendapatan Daerah

- 5) Pelaksaaan kegiatan dan keserasian yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah
- 6) Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 7) Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan bidang pendapatan daerah
- 8) Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang pendapatan daerah
- 9) Penyusunan rencana dan program bidang pendapatan daerah
- 10) Penyelenggaraan sistem pendapatan daerah
- 11) Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan praktikum bidang pendapatan daerah
- 12) Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan dibidang pendapatan daerah

c. Gambaran Personil

Seaimana kita maklumi personil merupakan persyaratan pokok yang perlu dipenuhi dalam rangka pelaksanaan tugas disuatu unit kerja di samping faktor penunjang lainnya seperti pembiayaan dan perlengkapan.

Sebagai perangkat daerah, yang memiliki tugas pokok, fungsi dan kewenangan, Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir saat ini didukung oleh personil PNS, di samping jumlah personil PNS sebagaimana tersebut, dan memperhatikan tugas pokok serta fungsi Dinas Pendapatan Daerah yang cukup luas dan memiliki spesifikasi tersendiri dalam menjalankan tugas, maka Dinas Pendapatan Indragiri Hilir juga

memperkerjakan / memperbantukan tenaga Non PNS, adapun jumlah personil PNS 90 orang dan 81 orang tenaga honorer, yang terdiri dari:

1) Latar Belakang Pendidikan

**Tabel: IV.1.
Latar Belakang Pendidikan**

No	Pendidikan Formal	Jumlah
1	Pasca Sarjana	4
2	Sarjana	28
3	Sarjana Muda	8
4	SLTA	47
5	SLTP	4
6	SD	3
Jumlah		171

Sumber: Dinas Pendapatan Indragiri Hilir, 2012

2) Kepangkatan PNS

**Tabel: IV.2.
Kepangkatan PNS**

No	Tingkat Kepangkatan Golongan	Jumlah
1	Golongan Ruang Gaji IV	4
2	Golongan Ruang Gaji III	38
3	Golongan Ruang Gaji II	41
4	Golongan Ruang Gaji I	7
Jumlah		90

Sumber: Dinas Pendapatan Indragiri Hilir, 2012

Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil tersebut tersebar antara lain pada Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir dan UPT Dipenda Kecamatan dengan tugas pokoknya adalah sebagai Juru Pungut.

Adapun gambaran penempatan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

3) Tenaga Non PNS (Juru Pungut)

Tabel: IV.3.
Tenaga Non PNS (Juru Pungut)

No	Tempat Tugas / Wilayah Kerja	Jumlah Personil
1	Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir	26
2	UPT Dipenda Kecamatan Tempuling (Wilayah Kerja Kec. Tempuling dan Kec. Kempas)	5
3	UPT Dipenda Kecamatan Tanah Merah (Wilayah Kerja Kec. Tanah Merah dan Kec. Enok)	3
4	UPT Dipenda Kecamatan Keritang (Wilayah Kerja Kec. Keritang)	2
5	UPT Dipenda Kecamatan Reteh (Wilayah Kerja Kec. Reteh dan Kec. Sungai Batang)	2
6	UPT Dipenda Kecamatan Gaung Anak Serka (Wilayah Kerja Kec. Gaung Anak Serka dan Kec. Batang Tuaka)	4
7	UPT Dipenda Kecamatan Gaung (Wilayah Kerja Kec. Gaung)	3
8	UPT Dipenda Kecamatan Kuala Indragiri (Wilayah Kerja Kec. Kuala Indragiri dan Kec. Concong)	2
9	UPT Dipenda Kecamatan Mandah (Wilayah Kerja Kec. Mandah dan Kec. Pelangiran)	3
10	UPT Dipenda Kecamatan Kateman (Wilayah Kerja Kec. Kateman, Kec. Pulau burung dan Kec. Belengkong)	1
11	UPT Dipenda Kecamatan Tembilahan (Wilayah Kerja Kec. Tembilahan Kec Tambilahan Hulu)	15
Jumlah		66

Sumber: Dinas Pendapatan Indragiri Hilir, 2012

4) Tenaga Non PNS lainnya

Tabel: IV.4.
Tenaga Non PNS Lainnya

No	Jabatan / Pekerjaan	Jumlah Personil	Tempat Tugas
1	Cleaning Service	4	Dinas Pendapatan Kab. Inhil
2	Teknisi Listrik/Elektronik	2	Dinas Pendapatan Kab. Inhil
3	Satpam	9	Dinas Pendapatan Kab. Inhil

Sumber: Dinas Pendapatan Indragiri Hilir, 2012

2. Aspek Stratejik Organisasi

Dalam rangka pelaksanaan misi organisasi sejalan dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan, maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang matang dalam menentukan program kerja pada tahun 2011.

Sehubungan dengan hal diatas sejalan dengan keberadaan Dinas Pendapatan selaku Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah kerja yang berwenang pada bidang Pendapatan Daerah maka diperlukan persiapan awal sebagai salah satu upaya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dimaksud, yang diarahkan pada beberapa kebijakan dan sekaligus merupakan strategi Dinas dalam pelaksanaan tugas agar terlaksana dengan baik.

Strategi yang menjadi aspek stratejik dimaksud meliputi beberapa hal antara lain aspek personil, aspek sarana / prasarana dan aspek kebijakan serta pedoman kerja dan pengawasan.

3. Struktur Organisasi

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 30 Tahun 2008, sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan pengendalian
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan
- c. Bidang Dana Perimbangan terdiri dari :

- 1) Seksi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
- 2) Seksi Pajak Bumi dan Bangunan
- d. Bidang Pajak, Retribusi dan PAD lainnya terdiri dari:
 - 1) Seksi Pajak
 - 2) Sekasi Retribusi dan PAD lainnya
- e. Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari:
 - 1) Seksi Pembukuan
 - 2) Seksi Verifikasi dan Pelaporan
- f. Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan terdiri dari:
 - 1) Seksi Pendatan dan Penetapan
 - 2) Sekasi Keberatan
- g. 10 Unit Pelaksana teknis Pendapatan kecamatan.

4. Visi dan Misi Dinas Pendapatan

a. Visi Organisasi

Adapun Visi Organisasi Dinas Pendapatn Kabupaten indragiri Hilir adalah ”Terwujudnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang optimal”.

b. Misi Organisasi

Untuk mendukung terlaksananya Visi sebagaimana tersebut diatas, maka diperlukan adanya Misi yang merupakan suatu penduan pelaksanaan tugas secara umum bagi organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir, yang idealnya dapat terlaksanakan dengan sebaik-baiknya adalah:

- 1) Meningkatkan Kinerja Aparatur Dinas Pendapatan melalui Pendidikan Dan Pelatihan
- 2) Meningkatkan dan mengoptimalkan kelengkapan data serta pengkajian potensi Penerimaan Asli Daerah melalui sumber daya alam yang dimiliki
- 3) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- 4) Meningkatkan kesejahteraan aparatur di lingkungan Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir
- 5) Meningkatkan pembinaan dan pelayanan terhadap wajib pajak dan wajib retribusi daerah secara profesional.
- 6) Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk kepentingan peningkatan Pendapatan Asli Daerah
- 7) Meningkatkan penegakan supremasi hukum baik terhadap aparatur maupun terhadap wajib pajak / wajib retribusi daerah.

5. Tujuan Sasaran

a. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi dari Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana yang dikemukakan pada bab iatas, maka perlu dijabarkan keadaan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perbuatan tujuan dan sasaran organisasi.

Tujuan Dinas Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak / retribusi daerah
- 2) Meningkatkan akuntabilitas publik pemerintah

- 3) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik
- 4) Meningkatkan kemampuan keuangan daerah untuk penyelenggaraan Pemerintah dan Belanja Pembangunan.

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pendapatan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kualitatif sehingga dapat diukur apa yang dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran yang ingin dicapai itu adalah :

- 1) Meningkatkan realisasi penerimaan Pajak dan Retribusi daerah
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban selaku warga negara yang baik
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
- 4) Adanya data-data objek dan subjek pajak / retribusi yang akurat
- 5) Meningkatkan akuntabilitas publik
- 6) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

1.2. Deskripsi Data Penelitian

Realisasi penerimaan PAD Kabupaten Indragiri Hilir selama periode tahun 2000 hingga 2011 terus mengalami peningkatan, yaitu Rp 3,181 miliar pada tahun 2000 meningkat menjadi Rp 55,879 miliar pada tahun 2011. Berikut ini adalah pendapatan asli daerah di Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel: IV.5.
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir

TAHUN	PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	BAGIAN LABA USAHA DAERAH	PENERIMAAN PAD LAINYA	PENDAPATAN ASLI DAERAH
2000	1,189,038,786	1,660,242,759	66,618,904	276,028,583	18,087,875,734
2001	2,705,862,888	11,263,521,438	116,562,270	2,572,197,220	374,057,471,829
2002	4,064,772,991	11,222,824,238	429,141,046	3,883,215,983	392,643,355,441
2003	5,313,846,895	11,112,035,017	3,529,680,153	2,972,140,906	421,005,557,960
2004	5,187,414,929	11,069,905,659	1,732,247,442	2,761,070,217	476,131,682,785
2005	5,259,269,439	14,814,998,641	1,143,347,199	3,643,158,429	579,969,413,664
2006	4,694,395,417	19,288,997,527	2,149,958,391	10,590,888,749	829,806,641,178
2007	7,021,638,974	19,646,710,610	5,342,859,212	11,989,128,399	824,302,246,791
2008	6,530,560,008	19,503,294,246	2,409,388,271	9,537,785,883	949,360,249,515
2009	8,333,477,094	20,805,759,393	3,901,095,591	7,594,741,989	846,292,471,399
2010	7,209,504,368	16,653,937,592	7,083,354,858	20,041,017,009	1,064,066,523,327
2011	10,027,902,162	14,105,943,496	6,916,816,048	24,828,985,385	1,394,239,478,794

Sumber: Dispenda Kabupaten Indragiri Hilir, 2011

Dari tabel diatas diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir diukur berdasarkan variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Usaha Daerah dan Penerimaan PAD Lainnya dari tahun 2000 sampai 2011. Pada aspek pendapatan pada sektor pajak daerah yang terendah pada tahun 2000 senilai 1,189,038,786 dan yang tertinggi pada tahun 2000 senilai 10,027,902,162. Selanjutnya pada aspek retribusi daerah diketahui bahwa jumlah terendah pada tahun 2000 dengan jumlah 1,660,242,759 dan tertinggi pada tahun 2009 yang berjumlah 20.805.759.393 dan pada aspek bagian laba usaha daerah dapat diketahui bahwa laba usaha terendah terjadi pada tahun 2000 dengan nilai 66.618.904 dan tertinggi pada tahun 2010 dengan nilai 7.083.354.858. Kemudian pada aspek penerimaan PAD lainnya yang terendah pada tahun 2000 dengan jumlah 276.028.583 dan yang tertinggi pada tahun 2011 dengan jumlah 24.828.985.385.

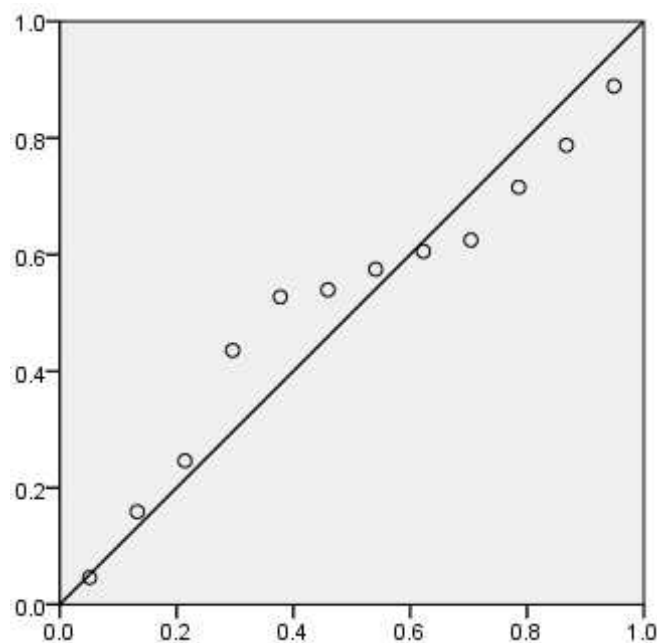
1.3. Analisis Kuantitatif Variabel Penelitian

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Deteksi normalitas dilihat dengan menggunakan grafik normal *P-P Plot of Regression Standarized Residual*. Pada gambar terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi memenuhi asumsi normalitas seperti terlihat pada gambar 5.1.

Gambar : IV.1
Diagram P-Plot Normalitas



Dari gambar IV.1 dapat dilihat bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Artinya model regresi layak dipakai untuk memprediksi variabel Pajak Daerah (x_1), Retribusi Daerah (x_2), Bagian Laba Usaha Daerah (x_3), Pendapatan Asli Daerah lainnya (x_4) Pendapatan Asli Daerah (y) di Kabupaten Indragiri Hilir.

Uji Normalitas adalah langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis multivariat khususnya jika tujuannya adalah inferensi. Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikelinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Dengan menggunakan perangkat lunak SPSS 16.0 dapat diketahui ada atau tidaknya gangguan multikolienaritas yang dapat dilihat secara umum yang ditunjukkan oleh nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF) dengan batasan nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas sekitar 1 dan angka tolerance mendekati 1.

Tabel: IV.6.
Hasil Uji Multikolinearitas Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Pajak Daerah (x_1)	.180	5.563	Terdapat multikolinearitas
Retribusi Daerah (x_2)	.496	2.017	
Bagian Laba Usaha Daerah (x_3)	.154	6.480	
Penerimaan PAD Lainnya (x_4)	.218	4.585	

Sumber: Data olahan penelitian, 2012

Tabel di atas menunjukkan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) disekitar angka 2 sampai 6, dan mempunyai angka tolerance mendekati 1 maka terjadi multikolinearitas. Artinya, setiap variabel independen tidak berdiri sendiri dan terjadi korelasi di antara variabel. yaitu pada variabel variabel Pajak Daerah (x_1), Retribusi Daerah (x_2), Bagian Laba Usaha Daerah (x_3) dan Penerimaan PAD Lainnya (x_4), yang memiliki korelasi antara keduanya (variabel X dan Y).

c. Uji Heterokedasitas

ini adalah varian sampel tidak dapat menggambarkan varian populasinya, dan model regresi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menaksir nilai variabel dependen pada nilai variabel independen tertentu. Ketentuan uji autokorelasi adalah sebagai berikut :

- a. Jika DW di bawah -2, berarti terdapat autokorelasi positif
- b. Jika DW di antara -2 sampai +2, berarti tidak terjadi autokorelasi
- c. Jika DW di atas +2, berarti autokorelasi negatif

Tabel: IV.7.
Hasil Uji Autokorelasi terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi
Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Indragiri Hilir

Variabel	Darbin Watson
a. Predictors: (Constant), PADlainya, Pajak, Retribusi, Laba	3.046
b. Dependent Variable: PAD	

Sumber: Data olahan penelitian, 2012

Pada tabel di atas terlihat bahwa angka Durbin Watson di atas sebesar 3.046 yang berarti tidak terjadi autokorelasi, hal tersebut karena angka Durbin Watson di atas berada di atas +2, yaitu sebesar 3.046 dan dapat disimpulkan bahwa regresi ini autokorelasi negatif

2. Pengujian Hipotesis Metode Regresi Linear Berganda

Pengujian hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua langkah, yaitu pengujian secara total/simultan dari masing-masing variabel bebas dan pengujian hipotesis secara individual (partial).

a. Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Untuk membuktikan hipotesis secara parsial digunakan uji t yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial atau sendiri-sendiri dalam menjelaskan variabel terikat sehingga diketahui variabel

mana yang paling dominan mempengaruhi variabel terikat yaitu PAD Di Kabupaten Indragiri Hilir dari keempat variabel bebas yang diteliti dalam penelitian ini.

Uji t dapat diketahui berdasarkan data pada tabel berikut ini:

Tabel: IV.8.
Uji Secara Parsial (Uji t) terhadap Faktor-faktor Yang Mempengaruhi
Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir

Variabel	t-hitung	t-tabel	Signifikansi
(Constant)	1.702	1.79	.133
Pajak Daerah (x_1)	4.258	1.79	.004
Retribusi Daerah (x_2)	3.871	1.79	.006
Bagian Laba Usaha Daerah (x_3)	2.932	1.79	.022
Penerimaan PAD lainnya (x_4)	8.501	1.79	.000

Sumber: Data olahan penelitian, 2012

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual serta untuk mengetahui variabel bebas yang mempunyai pengaruh dominan terhadap variabel terikat dengan mengukur derajat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat yang dijelaskan melalui hipotesis berikut ini.

1. Berdasarkan statistik nilai t Pajak Daerah (x_1) sebesar 4.258 dalam hal ini t-hitung lebih besar dari t-tabel 1.79. Hasil ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah (X_1) mempengaruhi PAD di Kabupaten Indragiri Hilir
2. Berdasarkan statistik nilai t Retribusi Daerah (x_2) sebesar 3.871 dalam hal ini t-hitung lebih besar dari t-tabel 1.79. Hasil ini menunjukkan bahwa Retribusi Daerah (x_2) mempengaruhi PAD di Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Berdasarkan statistik nilai t Bagian Laba Usaha Daerah (x_3) sebesar 2.932 dalam hal ini t-hitung lebih besar dari t-tabel 1.79. Hasil ini menunjukkan

bahwa Bagian Laba Usaha Daerah (x_3) mempengaruhi PAD di Kabupaten Indragiri Hilir.

4. Berdasarkan statistik nilai t Penerimaan PAD lainnya (x_4) sebesar 8.501 dalam hal ini t -hitung lebih besar dari t -tabel 1.79. Hasil ini menunjukkan bahwa Penerimaan PAD lainnya (x_4) mempengaruhi secara signifikan terhadap PAD di Kabupaten Indragiri Hilir.

Dengan demikian variabel yang paling dominan mempengaruhi PAD di Kabupaten Indragiri Hilir adalah variable Penerimaan PAD lainnya.

b. Uji Secara Simultan (Uji F)

Selanjutnya untuk melihat tingkat signifikan konstanta secara simultan yaitu diduga Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Usaha Daerah, dan Penerimaan PAD secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Indragiri Hilir digunakan uji Anova atau F test, dengan ketentuan: jika F hitung > F tabel maka variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Usaha Daerah, dan Penerimaan PAD berpengaruh secara signifikan terhadap PAD, demikian juga sebaliknya. Untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan tabel uji F Anova berikut ini.

Tabel: IV.9.
Hasil Uji F terhadap Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir

F	Sig
143.320	.000

Sumber: Data olahan penelitian, 2012

Dari tabel IV.9 diketahui F-hitung sebesar 143.320 dan dengan tingkat signifikan sebesar 0.000, sedangkan nilai F-tabel 143.320 pada tingkat

signifikansi 5%. Jadi dapat disimpulkan bahwa $F\text{-hitung} = 143.320 > F\text{-tabel} = 4.84$. artinya bahwa variabel Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), Bagian Laba Usaha Daerah (X3), dan Penerimaan PAD lainnya (X4), secara signifikan dapat mempengaruhi PAD (Y).

c. Koefisien Determinasi

Pengujian hipotesis secara total digunakan untuk melihat pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Seperti pada hipotesis: H_a : Diduga Pajak Daerah (x_1), Retribusi Daerah (x_2), Bagian Laba Usaha Daerah (x_3), dan Faktor Penerimaan PAD Lainnya (x_4) mempengaruhi secara simultan terhadap PAD (y) di Kabupaten Indragiri Hilir.

Untuk mengetahui secara simultan adalah dengan melihat hasil perhitungan khususnya nilai R square pada model summary berikut:

Tabel: IV.10.
Hasil Uji R terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir

R square	Adjusted R Square
.988	.981

Sumber: Data olahan penelitian, 2012

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Nilai Koefisien Determinasi (R^2) adalah antara nol dan satu. Jika Koefisien Determinasi (R^2) = 1 artinya variabel independen memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel independen. Jika Koefisien Determinasi (R^2) = 0 artinya variabel independen tidak mampu menjelaskan pengaruh variabel dependen. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai Koefisien Determinasi

(R²) sebesar 98.8% berarti hubungan antara variabel dependen terhadap independen sangat kuat atau tinggi karena berada antara nol dan satu.

Sedangkan angka *adjusted R square* (R²) adalah sebesar 0.981 menunjukkan bahwa 0.981 Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir bisa diterangkan dengan variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Usaha Daerah, dan Penerimaan PAD lainnya.

Penggunaan teknik data regresi berganda (*multiple regression analysis*) pada penelitian ini dimaksudkan untuk mencari hubungan antara variabel bebas yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Usaha Daerah, dan Penerimaan PAD lainnya terhadap PAD di Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan tabel IV.11 maka diperoleh model persamaan analisis jalur sebagai berikut:

Tabel: IV.11.
Hasil Regresi terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir

Model	Variabel	B
1	(Constant)	8.349
	PAJAK DAERAH	64.580
	RETRIBUSI	15.616
	LABA	-46.495
	PAD LAINYA	37.309
a. Dependent Variable: PAD		

Sumber: Data olahan penelitian, 2012

Persamaan regresi dari hasil perhitungan statistik didapat sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4$$

$$Y \text{ (PAD)} = 8.349 + 64.580 X_1 + 15.616 X_2 + 46.495 X_3 + 37.309 X_4$$

Dari persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Koefisien jalur variabel Pajak Daerah (x_1) = 64.580 menunjukkan besarnya pengaruh variabel tersebut terhadap PAD di Kabupaten Indragiri Hilir. Tanda positif menunjukkan koefisien arah hubungan yang positif, dengan arti ada kenaikan satu satuan variabel Pajak Daerah maka PAD di Kabupaten Indragiri Hilir akan naik sebesar 64.580 satuan dengan anggapan bahwa variabel yang lain konstan.
2. Koefisien jalur variabel Retribusi Daerah (x_2) = 15.616 menunjukkan besarnya pengaruh variabel tersebut terhadap PAD Di Kabupaten Indragiri Hilir. Tanda positif menunjukkan koefisien arah hubungan yang positif, dengan arti ada kenaikan satu satuan variabel Lingkungan kerja (x_2) maka PAD di Kabupaten Indragiri Hilir akan naik sebesar 15.616 satuan dengan anggapan bahwa variabel yang lain konstan.
3. Koefisien jalur variabel Bagian Laba Usaha Daerah (x_3) = -46.495 menunjukkan besarnya pengaruh variabel tersebut terhadap PAD di Kabupaten Indragiri Hilir. Tanda negatif menunjukkan koefisien arah hubungan yang negatif, dengan arti jika ada kenaikan satu satuan variabel Bagian Laba Usaha Daerah (x_3) maka PAD di Kabupaten Indragiri Hilir akan menurun sebesar -46.495 satuan dengan anggapan bahwa variabel yang lain konstan.
4. Koefisien jalur variabel Penerimaan PAD lainnya (x_4) = 37.309 menunjukkan besarnya pengaruh variabel tersebut terhadap PAD di Kabupaten Indragiri Hilir. Tanda positif menunjukkan koefisien arah hubungan yang positif, dengan arti ada kenaikan satu satuan variabel Penerimaan PAD (x_4) maka

PAD di Kabupaten Indragiri Hilir akan naik sebesar 37.309 satuan dengan anggapan bahwa variabel yang lain konstan.

1.4. Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PAD Di Kabupaten Indragiri Hilir, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Hasil penelitian secara persial menunjukkan bahwa variabel yang paling dominan mempengaruhi PAD di Kabupaten Indragiri Hilir adalah variable Penerimaan PAD lainnya. Nilai t Penerimaan PAD lainnya (x_4) sebesar 8.501 dalam hal ini t-hitung lebih besar dari t-tabel 1.79. Hasil ini menunjukkan bahwa Penerimaan PAD lainnya (x_4) mempengaruhi secara signifikan terhadap PAD di Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Secara simultan menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Usaha Daerah, dan Penerimaan PAD berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Indragiri Hilir.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah yang memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan daerah karena pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan PAD dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pendapatan asli daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir, dan untuk mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil penelitian terhadap model penelitian dan pengujian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan statistik nilai t Pajak Daerah (x_1) sebesar 4.258, hasil ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah (x_1) mempengaruhi PAD di Kabupaten Indragiri Hilir
2. Berdasarkan statistik nilai t Retribusi Daerah (x_2) sebesar 3.871, hasil ini menunjukkan bahwa Retribusi Daerah (x_2) mempengaruhi PAD di Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Berdasarkan statistik nilai t Bagian Laba Usaha Daerah (x_3) sebesar 2.932, hasil ini menunjukkan bahwa Bagian Laba Usaha Daerah (x_3) mempengaruhi PAD di Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Berdasarkan statistik nilai t Penerimaan PAD lainnya (x_4) sebesar 8.501, hasil ini menunjukkan bahwa Penerimaan PAD lainnya (x_4) mempengaruhi secara signifikan terhadap PAD di Kabupaten Indragiri Hilir.
5. Variabel-variabel pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah dan penerimaan PAD lainnya berpengaruh secara bersama-sama (simultan)

terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 98.8% berarti hubungan antara variabel dependen terhadap independen sangat kuat atau tinggi karena berada antara nol dan satu.

1.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran:

1. Dengan diterima hipotesis penelitian pada variabel penelitian, maka diharapkan Dinas Pendapatan Daerah Indragiri Hilir untuk lebih meningkatkan penerimaan daerah dengan memaksimalkan pos-pos anggaran pendapatan yang berpotensi meingkatkan PAD baik dari aspek pajak maupun retribusi dan penerimaan PAD lainnya.
2. Disarankan kepada Dinas Pendapatan Daerah Indragiri Hilir agar dapat lebih memaksimalkan penggunaan PAD untuk kemakmuran seluruh masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Disarankan kepada masyarakat wajib pajak dan pemilik usaha di daerah Indragiri Hilir agar melakukan pelunasan pembayaran pajak demi kemajuan Daerah Indragiri Hilir.
4. Disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menjadi penelitian ini sebagai referensi penelitian di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia. 2010. *Al-Qur'an*. Jakarta: Departemen Agama.
- Hendri, Jhon. 2009. *Riset Pemasaran*. Jakarta: Universitas Gunadarma.
- Mardiasmo, 2002. *Perpajakan Edisi Revisi 2002*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Muluk, Khairul. 2009. *Derajat Desentralisasi Antar Wilayah dari Suatu Negara*. Jakarta: Harmoni.
- Priyatno, Dwi. 2009. *Mandiri belajar SPSS (Statistical Product and Service Solution) untuk Analisis Data & Uji Statistik*. Yogyakarta: Media Kom.
- Ra'ana, Irfan Muhammad, *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Al-Khatab*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2007, Cet. Ke-3
- R. Santoso Brotodihardjo. 2005, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rahdina, 2008. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Depok Pada Era Otonomi Daerah [Skripsi]*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Rahmawati, Rina. 2009. *Analisis Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumedang [Skripsi]*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Rosdiana, H. dan R. Tarigan. 2005. *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saragih, J. P. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sekaran, Uma. 2008. *Metodelogi penelitian untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.

-
- .2004. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Siahaan, Marihot P. 2005. *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sinaga, B. M. dan H. Siregar. 2005. *Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Indonesia*. Direktorat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Waluyo dan Wirawan, B. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wetherill, G. B. 2003. *Regression Analysis with Application*. Chapman and Hall.
- Yani, Ahmad. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.